

BAGIAN 4  
KORUPSI DAN  
PENANGGULANGANNYA



# Koreksi Total Kinerja Demokrasi dan Antikorupsi

*Ahmad Khoirul Umam\**

Evaluasi kinerja demokrasi dan tata kelola pemerintahan global di tahun 2020 telah dirilis oleh sejumlah lembaga kredibel pada awal tahun 2021 ini. Secara general, pandemi Covid-19 terbukti telah menjadi pengubah permainan (*game changer*), yang berpengaruh signifikan (*major blow*) terhadap kualitas kerja pembangunan demokrasi dan juga antikorupsi selama satu tahun terakhir.

Dalam konteks Indonesia, penilaian terhadap kinerja demokrasi dan antikorupsi juga mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan laporan Indeks Demokrasi 2020 yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) pada 3 Februari 2021, skor indeks demokrasi Indonesia menurun dari 6,48 (2019) menjadi 6,3 (2020). Dari lima indikator dasar demokrasi yang digunakan, nilai proses Pemilu dan pluralisme (7,92), fungsi dan kinerja pemerintah (7,5) dan partisipasi politik (6,11), tergolong baik. Namun, dua indikator lainnya, yaitu budaya politik (4,38) dan kebebasan sipil (5,59), nilainya rendah dan tidak mampu mengangkat agregat indeks. Akibatnya, skor indeks demokrasi Indonesia kali ini termasuk angka terendah dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Dari empat

---

\*A. Khoirul Umam adalah Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina, Jakarta. Umam meraih gelar Ph.D dari School of Political Science & International Studies, The University of Queensland, Australia (2017). Fokus penelitiannya meliputi kajian *Public Integrity & Anti-Corruption Studies, Democratization in Southeast Asia, Islam in International Politics, and Australia & Pacific Studies*. Saat ini, menjabat sebagai Managing Director of Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Jakarta. Bisa dihubungi melalui E-mail: [ahmad.khoirul@paramadina.ac.id](mailto:ahmad.khoirul@paramadina.ac.id).

kategori demokrasi yang dirumuskan EIU, Indonesia masuk dalam kategori “demokrasi cacat” (*flawed democracies*). Ironisnya, indeks demokrasi Indonesia sendiri berada di bawah Malaysia, Filipina, dan bahkan Timor Leste.

Sebelumnya, Transparency International (TI) juga telah merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2020 yang juga memberikan “rapor merah” bagi kinerja pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. IPK tahun 2020 Indonesia telah mengalami penurunan tajam sebesar 3 poin, dari semula 40 (2019) menjadi 37 (2020), pada skala 0 yang berarti sangat korup hingga 100 yang terkategori sangat bersih. Penurunan IPK ini menjadi yang pertama sejak tahun 2008. Bahkan, IPK sebesar 37 ini juga menandai Indonesia telah mundur jauh lima tahun ke belakang, di mana pada tahun 2016 IPK Indonesia juga berada di angka yang sama (37). Akibatnya, Indonesia yang semula di peringkat 85, kini terjun bebas ke posisi 102, dari 180 negara yang disurvei.

Dua “rapor merah” dari EIU dan TI di atas harus benar-benar menjadi bahan koreksi sekaligus evaluasi atas kinerja pembangunan demokrasi dan antikorupsi di Tanah Air. Sebab, sejak awal pandemi, TI telah mengingatkan masyarakat global bahwa pandemi Covid-19 berpotensi memfasilitasi menguatnya fenomena “neo-otoritarianisme” di sejumlah negara.

Pandemi telah memaksa negara merelaksasikan sejumlah aturan pemerintahan mengingat pentingnya kecepatan pengambilan keputusan guna menyelamatkan nyawa dan kondisi sosial-ekonomi yang terdampak oleh pandemi. Ironisnya, relaksasi aturan di masa pandemi itu memberikan peluang bagi terjadinya sentralisasi kekuasaan yang mudah dibajak oleh kekuatan politik (*politically hijacked*) dalam suatu negara. Akibatnya, perilaku kediktatoran dan otoritarianisme yang mengancam demokrasi justru mendapatkan panggung di tengah pandemik (TI, 2020).

Indikator dari menguatnya otoritarianisme itu umumnya ditandai oleh semakin melemahnya kebebasan sipil dan terkikisnya kebebasan berekspresi. Kelompok-kelompok yang kritis dan berseberangan secara politik dengan Pemerintah dihadapkan sikap represi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Represi secara langsung itu bisa menggunakan instrumen penegak hukum melalui cara-

cara kriminalisasi, baik penersangkaan dan penuntutan, maupun pengetatan aturan untuk membatasi ruang gerak rival politik. Bahkan, “operasi senyap” untuk menjalankan strategi pecah-belah guna menciptakan faksionalisme dan perpecahan di internal kekuatan lawan, juga sering terjadi.

Sementara itu, langkah-langkah represi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui operasi serangan digital yang melemahkan psikologi dan kepercayaan diri lawan melalui *bully*, *doxing*, hingga teror pribadi maupun kelompok yang dilakukan oleh pasukan *buzzer* yang bergerak di ruang digital. Pergerakan tim *buzzer* ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena tim seperti ini seringkali bergerak sangat cepat, massif, dan sistematis, hingga mampu membuat lawan politik tergetar hingga berpikir ulang untuk melanjutkan sikap kritis dan pergerakan politiknya.

Hal itu mengindikasikan bahwa ada tim solid yang didukung oleh peralatan teknologi canggih dengan *back up* logistik dan sumber daya (*resources*) besar di balik operasi tim-tim *buzzer* ini. Mencermati kuatnya kapasitas dan luasnya jaringan mereka, besar kemungkinan operasi semacam ini dikendalikan oleh mereka yang berada di dalam lingkaran kekuasaan.

Alhasil, ketika kritisisme masyarakat politik dikebiri, dikriminalisasi dan diteror, hal itu berpengaruh besar terhadap melemahnya kapasitas pengawasan publik terhadap jalannya tata kelola pemerintahan. Ketika pengawasan publik melemah, celah-celah korupsi berskala besar semakin terbuka lebar. Dalam konteks ini, kita bisa memahami bagaimana kualitas kinerja pembangunan demokrasi memiliki korelasi yang sangat dekat dengan agenda antikorupsi dan reformasi tata kelola pemerintahan.<sup>1</sup> Karena pada hakikatnya, korupsi merupakan konsekuensi dari kekuasaan yang tidak terkontrol. Maka, melemahnya pengawasan publik bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kekuatan politik untuk melakukan sentralisasi kekuasaan hingga menggerus fondasi demokrasi secara fatal. Untuk itu, koreksi atas kondisi ini harus benar-benar menjadi

<sup>1</sup>S. Rose-Ackerman, *Corruption and Government, Causes, Consequence and Reform* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999); Adam Graycar & Tim Prenzler, *Understanding and Preventing Corruption* (New York: Pargrave Macmillan, 2013).

perhatian Pemerintah dan juga masyarakat untuk mengawal kerja-kerja penguatan demokrasi dan agenda antikorupsi di Tanah Air.

*Pertama*, presiden sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan harus menunjukkan komitmennya secara tegas untuk menghentikan praktik-praktik pengebirian kebebasan sipil. Lembaga penegak hukum, termasuk lembaga pengawas dan pengatur, bukanlah alat politik untuk melayani kepentingan kekuasaan. Untuk itu, instrumen penegak hukum harus benar-benar diarahkan pada kinerja penegakan hukum yang netral, independen, adil dan imparial.

*Kedua*, terkait dengan agenda penguatan budaya politik, maraknya praktik eksploitasi politik identitas dan juga politik uang (*money politics*) di tengah masyarakat, menjadi penting untuk diperhatikan. Politik identitas dan politik uang tidak hanya menciptakan polarisasi yang begitu dalam di tengah masyarakat, tetapi juga mengkhianati tujuan proses demokrasi yang sesungguhnya, yakni menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (*good governance*).<sup>2</sup> Dengan demikian, proses politik bisa diorientasikan pada kerja-kerja pelayanan publik yang efektif (*public delivery service*) dan menghadirkan solusi bagi permasalahan publik. Untuk itu, dibutuhkan komitmen seluruh *stakeholders* politik, baik yang berada di parlemen maupun di luar parlemen, untuk menetralsir budaya-budaya politik yang tidak produktif tersebut.

*Ketiga*, *grand design* pemberantasan dan pencegahan korupsi harus benar-benar ditempatkan sebagai prioritas bagi kinerja pemerintahan ke depan. Jangan lagi kerja-kerja pemberantasan korupsi justru dianggap sebagai agenda yang menciptakan instabilitas politik yang tidak produktif bagi upaya pembangunan ekonomi. Presiden Jokowi harus memahami bahwa agenda penguatan demokrasi dan pembangunan ekonomi akan rapuh jika menegasikan kerja-kerja pemberantasan dan pencegahan korupsi. Dalam konteks ini, penguatan KPK masih tetap menjadi prioritas utama. Semoga Presiden Jokowi memahami koreksi dan juga menjalankan evaluasi, untuk kebaikan legasi yang akan ia tinggalkan nanti.

---

<sup>2</sup>Vedi R. Hadiz, *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah* (Jakarta: LP3ES & LabSosio Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia, 2019); World Bank, *Anti-Corruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate* (Washington DC: World Bank, 2000).

## Dilema Penanganan Politik Identitas dan Pelemahan Demokrasi

Tantangan lain demokrasi Indonesia saat ini adalah persoalan politik identitas. Pasca Pilpres tahun 2014, Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, dan Pilpres tahun 2019, demokrasi Indonesia dihadapkan pada tantangan besar berupa eksploitasi politik identitas yang menciptakan polarisasi akut di tengah masyarakat. Eksploitasi politik identitas ini berakar pada dipeliharanya sentimen agama dan nasionalisme hingga membuat atmosfer politik nasional menjadi beku dan kian mengeras. Di sini, terjadi apa yang disebut soliditas kekuatan "konservatisme Islam" di satu sisi, dan "hyper-nationalisme" di sisi lain.<sup>3</sup>

Dalam pertarungan politik tahun 2019, konfrontasi antardua kekuatan ekstrem politik identitas itu seolah meniadakan ruang moderasi (*wasathiyah*) atau "jalan tengah" (*middle way*) yang mengedepankan rasionalitas dan kematangan berpikir. Keberpihakan terhadap salah satu pihak seolah wajib, dan berdiri di tengah seolah merupakan kesalahan. Akibatnya, dinamika demokrasi tidak menyisakan ruang dialogis yang memadai. Sebaliknya, justru ketegangan, kebencian, dan sikap saling curiga kian menguat di tengah masyarakat. Realitas politik seperti itu merupakan peringatan keras bagi kian mudarnya fondasi persatuan dan kesatuan bangsa.

Menghadapi hal itu, pemerintahan Presiden Jokowi tidak berusaha menciptakan ruang dialogis untuk memecah kebuntuan komunikasi antara kelompok ekstrem kanan dan kiri dalam ruang demokrasi nasional. Sebaliknya, Pemerintah yang disimbolkan sebagai representasi kekuatan nasionalis justru lebih memiliki langkah-langkah represif dalam menghadapi kelompok-kelompok Islam konservatif tersebut. Alhasil, bukannya menurunkan ketegangan, langkah kebijakan itu justru berpotensi semakin menumpuk kebencian dan kecurigaan antarkelompok. Adapun stabilitas politik yang dihasilkan pasca langkah represi itu akan cenderung bersifat semu dan laten, serta akan kembali bangkit pada momentum politik lain di masa mendatang.

<sup>3</sup>Vedi R. Hadiz & Inaya Rakhmani, *Marketing Morality in Indonesia's Democracy* (Melbourne: Asian Studies Association of Australia [ASAA], 2019).

Pasca pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2017 lalu, Pemerintah kembali mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani enam menteri sebagai landasan aturan pembubaran organisasi massa Front Pembela Islam (FPI), sekaligus larangan bagi setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI. Langkah Pemerintah ini belakangan memunculkan kontroversi, karena di satu sisi dituding sebagai langkah represi yang semakin memberangus kebebasan sipil, namun di sisi lain dianggap perlu untuk menralisir kian berkembangnya kekuatan sosial-keagamaan yang dianggap menggerogoti fondasi persatuan bangsa.

Meskipun juga lahir dari akar tradisi Islam *Ahlusunnah waljamaah*, sepak terjang FPI justru dianggap merepresentasikan watak kekuatan intoleran dan konservatif. Bahkan dalam perkembangannya, keberadaan FPI yang seringkali menggunakan pendekatan kekerasan dan propaganda yang kuat, sering bertabrakan dengan elemen Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang selama ini dianggap sebagai dua kekuatan “Islam Nusantara yang Berkemajuan” di Indonesia.

Bahkan, pada momentum Pilkada DKI Jakarta tahun 2016 yang sarat dengan eksploitasi politik identitas dan menciptakan polarisasi politik serta pembelahan sosial yang amat dalam, FPI tampil sebagai salah satu aktor utama di dalamnya. Kekuatan itu seolah terus dipelihara oleh kelompok kepentingan politik tertentu untuk menyambut Pemilu 2019, sehingga FPI yang menjadi representasi kekuatan Islam yang berseberangan dengan mereka yang berada di lingkaran pemerintahan, mampu terus memperkuat otot politiknya dan mengembangkan akarnya hingga ke luar Jawa, seperti Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan lainnya.

## **Menakar Efektivitas**

Yang selanjutnya menjadi pertanyaan publik adalah, seberapa efektif langkah pelarangan FPI oleh Pemerintah ini? Mampukah FPI benar-benar hilang dari ingar-bingar politik dan demokrasi? Pada saat yang sama, sebagian masyarakat sipil yang sebenarnya kurang setuju dengan pola gerakan FPI, juga khawatir dengan pilihan-pilihan sikap represif Pemerintah yang memunculkan beragam spekulasi tentang nasib dan masa depan demokrasi dan kebebasan sipil di Tanah Air.



Pertanyaan di atas layak diajukan mengingat beberapa hal. *Pertama*, FPI hanyalah organisasi yang memang bisa dimatikan perizinan kelembagaan dan aktivitasnya. Namun, FPI juga telah bertransformasi menjadi identitas sosial yang memuat nilai, sentimen sosial, sekaligus ide gerakan yang tetap hidup (*the living values*) di segmen masyarakat pengikutnya. Sehingga tidak mengagetkan ketika dua hari pasca pembubaran FPI, muncul pendeklarasian organisasi baru dengan nama sedikit berbeda, namun tetap menggunakan akronim yang sama, yakni FPI.

*Kedua*, jika memang organisasi “FPI-reborn” itu juga akan tetap dibubarkan, maka elemen-elemen penggerak FPI akan cenderung berubah menjadi sporadis. Untuk mengecoh aturan, mereka bisa membuat nama yang berbeda-beda di setiap daerah. Namun di sisi lain, mereka akan tetap mudah digerakkan dengan basis isu, narasi, sentimen keagamaan, provokasi, hingga propaganda yang begitu mudah membangkitkan kolektivitas gerakan mereka.

*Ketiga*, nalar gerakan FPI dan organisasi sejenisnya akan terus hidup seiring dengan terjaganya peredaran narasi kebencian terhadap kelompok lain, kecurigaan terhadap setiap respons negara, kekecewaan terhadap Pemerintah akibat terjaganya masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial, hingga ter-*maintain*-nya ujaran kebencian dan *hoax* terkait kebangkitan komunisme, sentimen anti-China, dan lainnya.

Karena itu, dalam menyikapi FPI atau organisasi semacamnya, hendaknya tidak semata-mata dilandaskan pada pola pendekatan struktural. Tetapi juga membutuhkan pola pendekatan dan penyikapan non-struktural, yang membutuhkan komitmen serius dari berbagai elemen bangsa, baik elemen politik, aktor negara, maupun kekuatan non-negara (*non-state actor*).

## **Ambivalensi Penyikapan**

Jika kita cermati lebih mendalam, kemunculan FPI merupakan produk dari dinamika politik. Ditulis dengan jelas oleh Robert W. Hefner dalam artikel berjudul *Muslim Democrats and Islamist*

*Violence in Post-Soeharto Indonesia*<sup>4</sup> bahwa kelahiran FPI tidak lepas dari nama-nama besar mantan elite militer yang mencoba memanfaatkan kekuatan Islam konservatif di masyarakat urban Jakarta, untuk kebutuhan politik dan dinamika pengamanan pasca Reformasi.

Belum lekang dari memori kita, bagaimana FPI melakukan mobilisasi ribuan massa yang disebut Pam Swakarsa untuk melindungi DPR dan Pemerintah dari tekanan kelompok demonstran yang menolak transisi dari Soeharto kepada Habibie. Setelah kepentingannya terpenuhi, para elite itu segera mencuci tangan dan tidak mengantisipasi dengan cermat bagaimana efek sampingnya terhadap fondasi keumatan dan kebangsaan di Tanah Air.

Selanjutnya, FPI memanfaatkan ruang demokrasi dan menguatnya gerakan Islamisasi pasca Reformasi untuk terus berkembang. Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kualitas demokrasi Indonesia bahkan sempat mendapatkan predikat “*Free*” oleh Freedom House (2010-2011), yang mengindikasikan bahwa hak-hak politik dan kebebasan sipil dijamin kala itu. Sehingga, bisa dipahami jika negara tidak memilih langkah represif dalam menyikapi “kenakalan-kenakalan” FPI kala itu. Dengan kata lain, tuduhan dari para Indonesianist lainnya Marcus Mietzner dan Edward Aspinall,<sup>5</sup> Greg Fealy,<sup>6</sup> dan Kikue Hamayotsu,<sup>7</sup> yang saat itu juga diadopsi oleh sebagian masyarakat sipil bahwa terjadi “pembiaran” FPI di era pemerintahan SBY, menjadi kurang tepat dan tidak relevan. Hal itu dibuktikan oleh penangkapan dan pemenjaraan Rizieq Syihab pada Juni 2008 ketika elemen FPI dengan mengatasnamakan Forum Umat Islam (FUI) membuat onar melakukan pemukulan dalam acara peringatan Kesaktian Pancasila di Monas, Jakarta.

---

<sup>4</sup>Robert. W. Hefner, *Muslim Democrats and Islamist Violence in Post-Soeharto Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2005).

<sup>5</sup>Marcus Mietzner & Edward Aspinall, *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010).

<sup>6</sup>Greg Fealy & Sally White, *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008).

<sup>7</sup>Kikue Hamayotsu, “Beyond Faith and Identity: Mobilizing Islamic youth in a democratic Indonesia” *The Pacific Review*. Vol.24(2), 2011.

Namun seiring berjalannya waktu, khususnya pasca 2014, FPI telah mulai bertransformasi menjadi kekuatan politik. Meminjam analisis Teori Oligarki yang dikembangkan oleh Richard Robison dan Vedi Hadiz<sup>8</sup> serta Jeffrey A. Winters<sup>9</sup> bahwa kebangkitan kekuatan sosial-politik seringkali tidak lepas dari kolaborasi dengan kekuatan modal yang menjadi penopang sebuah gerakan. Dalam konteks ini, gerakan Islam populis yang diperagakan oleh FPI utamanya sejak Pilkada DKI Jakarta tahun 2016, tidak lepas dari sokongan kekuatan-kekuatan politik dan pemodal yang berada di balik dinamika kekuasaan.

Transformasi gerakan FPI tidak lepas dari dukungan logistik dan dukungan politik dari elite-elite kekuasaan dan pemodal yang memanfaatkan “jasa gerakan” yang dijalankan oleh mesin politik bernama FPI. Dengan ruang *exposure* yang besar, dukungan logistik yang kuat, dan keberadaan gelar Habib atau trah keturunan Nabi Muhammad SAW sebagai pimpinan tertingginya, membuat FPI begitu mudah memperkuat basis pengaruh sosialnya, khususnya di tengah masyarakat Islam perkotaan.

Hal itu didukung oleh kuatnya semangat (*ghirah*) masyarakat muslim Indonesia kontemporer dalam ber-Islam, yang sayangnya tidak diimbangi dengan kapasitas keilmuan dan semangat belajar yang memadai terkait khazanah *Fiqh*, *Usul Fiqh*, *Ulumul Quran*, *Tafsir Hadiz* dan kajian keislaman dasar lainnya. Sehingga, proses pembelajaran keislaman yang dijalani cenderung instan, dangkal dan meminimalkan proses transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*). Sebaliknya, proses pembelajaran itu justru mengoptimalkan terdistribusinya narasi, provokasi, dan propaganda keagamaan yang juga mencampuradukkan *hoax*, *fake news* serta ujaran kebencian (*hate speech*). Alhasil, majelis-majelis keagamaan bukannya memperkuat basis persatuan bangsa, melainkan justru menciptakan polusi dalam ruang keumatan kita yang semakin pengap.

### **Konsistensi Penyikapan**

Jika era pemerintahan SBY relatif tidak memiliki pola relasi konfliktual dengan kekuatan Islam, kini era pemerintahan Presiden

<sup>8</sup>Richard Robison & Vedi R. Hadiz, *Reorganizing Power in Indonesia*. New York: Routledge Curzon.

<sup>9</sup>Jeffery A. Winters, *Oligarchy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

Jokowi hampir tidak pernah luput dari serangan kelompok Islam. Belakangan ini, FPI terbukti berhasil melakukan mobilisasi massa hingga mampu menciptakan instabilitas politik dan mengancam legitimasi kekuasaan, sehingga wajar jika pemerintahan Jokowi bersikap lebih tegas pada FPI.

Uniknya, jika pemerintahan begitu tegas terhadap FPI, namun di sisi lain, pemegang kekuasaan justru lebih bersifat akomodatif terhadap elemen politik yang selama ini menikmati dukungan kuat dari massa pengikut FPI. Dengan kata lain, mereka yang menikmati eksploitasi politik identitas dan konsolidasi kekuatan Islam konservatif yang dimotori oleh FPI justru disambut dengan tangan terbuka untuk ikut duduk di kekuasaan. Sehingga wajar jika sempat muncul keretakan koalisi di awal periode kedua pemerintahan Jokowi, yang ditandai protes Partai Nasdem dan PKB, meskipun akhirnya mudah diredam ketika PDIP justru bersikap sebaliknya.

Untuk itu, ke depan, efektif atau tidaknya langkah pembubaran dan pelarangan FPI ini tergantung pada beberapa faktor mendasar. *Pertama*, konsistensi penyikapan dari seluruh *stakeholders* kekuasaan dan aktor politik di Tanah Air. Jika memang merasa kekuatan konservatisme agama mulai mengancam akar persatuan bangsa, maka seluruh kekuatan politik harus konsisten untuk menjauhi dan tidak ikut-ikutan mengeksploitasi kekuatan ini untuk kepentingan sesaat. Mementingkan kepentingan politik sempit dengan menggadaikan fondasi kebangsaan adalah sikap “negarawan gadungan” yang amat menjijikkan. Untuk itu, rakyat harus semakin cerdas mencermati setiap perilaku elite politik yang didukungnya.

*Kedua*, pembubaran dan pelarangan organisasi hanya akan membuat elemen umat dan pengikutinya menjadi sporadis. Dalam konteks ini, peran masyarakat sipil berbasis keislaman (*Islamic-based civil society*) benar-benar dibutuhkan untuk menetralkan dinamika pemikiran dan pola gerakan mereka. Karena itu, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, termasuk *Robhitoh Alawiyah*, atau organisasi yang menjadi payung tempat bernaung seluruh jaringan para Habaib di Indonesia, benar-benar dibutuhkan untuk meredam dinamika sosial di akar rumput. NU dan Muhammadiyah sebagai jangkar kekuatan Islam di Indonesia harus mampu mengayomi, bukan terjebak dalam ruang interaksi yang konfrontatif. Di sisi lain,

*Robhitoh Alawiyah* juga diharapkan mampu mengkonsolidasikan dan meredam ketegangan yang muncul di kalangan jaringan para Habib di Tanah Air. Sehingga umat bisa lebih mudah dikendalikan. Kolaborasi kekuatan antara NU, Muhammadiyah, dan *Robhitoh Alawiyah* akan menjadi instrumen yang efektif untuk mengembalikan perjuangan umat kepada karakter Islam *Ahlu Sunnah Waljamaah* yang toleran, moderat dan berorientasi pada kemaslahatan dan pendidikan umat yang cerdas dan berpengetahuan luas.

*Ketiga*, Pemerintah harus tetap menjaga ruang kebebasan sipil secara adil dan tidak memihak. Islam mengajarkan, “kebencianmu terhadap suatu kaum, jangan sampai membuatmu bersikap tidak adil”. Komitmen itu harus diwujudkan melalui langkah kebijakan negara yang transparan dan akuntabel, terutama dalam menjaga ruang *cyber* dan media sosial dari pengembangbiakan narasi kanan-konservatif, intoleransi, termasuk juga *hoax*, *fake news* dan *hate speech* yang semakin mempertajam polarisasi dan eksploitasi politik identitas di Tanah Air. Jika langkah-langkah itu dilakukan, gerakan konservatisme dan intoleransi akan dapat ditekan secara efektif. Namun jika langkah Pemerintah ambigu dan memihak, maka pola gerakan “mati satu tumbuh seribu” akan kembali hadir dan mengancam masa depan demokrasi di Tanah Air.

## Bibliografi

- Fealy, Greg & Sally White. 2008. *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Graycar, Adam & Tim Prenzler. 2013. *Understanding and Preventing Corruption*. New York: Pargrave Macmillan.
- Hadiz, Vedi R. & Inaya Rakhmani. 2019. *Marketing Morality in Indonesia's Democracy*. Melbourne: Asian Studies Association of Australia (ASAA).
- Hadiz, Vedi R. 2019. *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah*. Jakarta: LP3ES & LabSosio Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia.
- Hamayotsu, Kikue. 2011 “Beyond Faith and Identity: Mobilizing Islamic youth in a democratic Indonesia”. *The Pacific Review*. Vol.24(2).

- Hefner, Robert. W. 2005. *Muslim Democrats and Islamist Violence in Post-Soeharto Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Mietzner, Marcus & Edward Aspinall. 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Robison, Richard & Vedi R. Hadiz. 2004. *Reorganizing Power in Indonesia*. New York: Routledge Curzon.
- Rose-Ackerman, S. 1999. *Corruption and Government, Causes, Consequence and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press
- Winters, Jeffery A. 2011. *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- World Bank. 2000a. *Anti-Corruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate*. Washington DC: World Bank.